



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**(DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2025		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak
	Kegiatan	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota
	Sub Kegiatan	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota
	Tujuan	Memberikan dasar untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender dan anak.
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komperhenisf tahun 2024 : 160 Korban (UPTD PPA)</li><li>- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA</li></ul>
Baris 3	Faktor Kesenjangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya Pemahaman PD dalam mendukung pengumpulan data gender dan anak.</li><li>- Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Teknologi</li><li>- Keterbatasan Data yang Akurat dan Komprehensif</li><li>- Keterbatasan Koordinasi antar Lembaga</li></ul>
	Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah SDM Pelaksana terbatas (quantity)</li><li>- Anggaran tidak mendukung target</li></ul>
	Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pemahaman PD tentang pentingnya data gender dan anak.</li><li>- Data yang diminta Tidak Tersedia di PD.</li><li>- Kurangnya Dukungan Kebijakan</li><li>- Data yang Tidak Lengkap dan Tidak Akurat</li><li>- Kurangnya Dukungan dari Stakeholder</li></ul>

Baris 4	Tujuan Responsif Gender	Memberikan dasar untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender dan anak.	
Baris 5	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FGD Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengumpulan Data Gender dan Anan</li> <li>2. Pelatihan Simfoni Kemen PPPA</li> <li>3. Usul Kegiatan Statistik Sektoran Penyusunan Data Gender dan Anak melalui ROMANTIK (BPS)</li> <li>4. Upgrade Aplikasi SIPPEKA</li> </ol>	
Baris 6	Data Dasar/Baseline	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komperhenisf tahun 2024 : 160 Korban (UPTD PPA)</li> <li>- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA</li> </ul>	
Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	Tersedia dan tersajinya Dokumen Data Gender dan anak kota Samarinda
		Outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu mempermudah dalam mendapatkan informasi data gender dan anak,</li> <li>- Meningkatnya partisipasi PD dalam pengumpulan data gender dan anak,</li> <li>- Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak</li> <li>-</li> </ul>
		Dampak	Tersedianya data gender dan anak kota Samarinda

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**

Rembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**(DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**TAHUN ANGGARAN** : **2025**

<b>PROGRAM</b>	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		
<b>KEGIATAN</b>	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota		
<b>KODE Kegiatan</b>	2.08.05.2.01		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komperhenisf tahun 2024 : 160 Korban (UPTD PPA)</li> <li>- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA</li></ul>		
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan</b>	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	
		<b>Tujuan</b>	Memberikan dasar untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang inklusif dan responsif terhadap isu gender dan anak.
		<b>Aktivitas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. FGD Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengumpulan Data Gender dan Anan</li><li>2. Pelatihan Simfoni Kemen PPPA</li><li>3. Usul Kegiatan Statistik Sektoran Penyusunan Data Gender dan Anak melalui ROMANTIK (BPS)</li><li>4. Upgrade Aplikasi SIPPEKA</li></ol>

		<b>Sumber daya (Inputs)</b>	SDM Pengelola Data (1 dari kebutuhan 3)
			Anggaran : PAD
			Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)
		<b>output</b>	Tersedianya Dokumen Data Pilah Gender dan Anak
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp. 250.000.000	
	<b>SDM</b>	Pegawai PD, Tenaga Ahli (UNTAG), Operator Simfoni (RS. AWS, RS. I.A Moeis, UPPA Polresta, UPTD PPA, DP2PA)	
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	ATK, Komputer, Laptop, Printer, Wi-Fi, Hard-Disk Eksternal.	
<b>Outcomes</b>	Peningkatan Akurasi dan Ketepatan Kebijakan		
<b>Dampak</b>	Terwujudnya Sistem Data yang Terintegrasi dan Mutakhir, Perencanaan Pembangunan yang Lebih Inklusif dan Responsif.		

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas


  
**DR. Jonu Araby, M.M.Pd**  
 Pembina Utama Muda IV/ c  
 NIP. 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
 Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

LEMBAR KERJA  
 GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
 Tahun 2025

Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
	Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol>	
	Tujuan	Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan keberlanjutan kinerja lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota agar mampu memberikan layanan yang responsif gender, terstandar, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta peningkatan kesejahteraan perempuan.	
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	Organisasi Perempuan : 57 Koordinator PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Anggota PEKKA Tahun 2024 : 108 Orang Jumlah Ormas Perempuan terstandardisasi : 0	
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terdapat kesenjangan antara keberadaan organisasi perempuan dan kualitas kapasitas kelembagaan serta layanan pemberdayaan perempuan yang mampu mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender dan kemandirian perempuan secara optimal.</li> </ol>
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum optimalnya sistem pembinaan dan pendampingan berkelanjutan terhadap organisasi perempuan dan LPLPP pasca sosialisasi dan bimtek.</li> </ol>

		<p>3. Belum optimalnya sistem pembinaan dan pendampingan berkelanjutan terhadap organisasi perempuan dan LPLPP pasca sosialisasi dan bimtek.</p>
	Sebab Kesenjangan Eksternal	<p>1. Kapasitas kelembagaan dan SDM organisasi perempuan/LPLPP masih beragam, sehingga belum seluruhnya mampu menjalankan fungsi layanan pemberdayaan perempuan secara profesional dan berkelanjutan.</p> <p>2. Rendahnya pemahaman sebagian organisasi perempuan dan masyarakat terhadap kebijakan kesetaraan gender dan implementasi PUG.</p> <p>3. Masih terbatasnya akses perempuan kepala keluarga (PEKKA) terhadap pelatihan, jejaring usaha, dan dukungan ekonomi berkelanjutan, meskipun jumlah peserta pelatihan meningkat.</p> <p>4. Belum terbentuknya ekosistem kemitraan lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas) yang mendukung penguatan dan standardisasi organisasi perempuan/LPLPP.</p>
Baris 4	Tujuan Responsif Gender	Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan keberlanjutan kinerja lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota agar mampu menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan termasuk kelompok perempuan rentan melalui layanan yang responsif gender, terstandar, serta berorientasi pada pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan perempuan.
Baris 5	Rencana Aksi	<p>1. Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender kepada Organisasi Perempuan / LPLPP : 53 Organisasi</p> <p>2. Sosialisasi tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan kepada Organisasi Perempuan / LPLPP : 53 Organisasi</p> <p>3. Bimtek LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) : 53 Organisasi</p> <p>4. Pelatihan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) : 139 Orang</p>
Baris 6	Data Dasar/Baseline	<p>Organisasi Perempuan : 57</p> <p>Koordinator PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)</p>

			Anggota PEKKA Tahun 2024 : 108 Orang Jumlah Ormas Perempuan terstandardisasi : 0
Baris 7	Pengu- kuran Hasil	Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) yang memperoleh sosialisasi kebijakan kesetaraan gender dan PUG.</li> <li>2. Meningkatnya jumlah perempuan (termasuk PEKKA) yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan.</li> </ol>
		Outcome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses, partisipasi, dan manfaat perempuan—termasuk kelompok perempuan rentan— terhadap layanan pemberdayaan perempuan.</li> <li>2. Meningkatnya peran dan kinerja kelembagaan LPLPP dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).</li> <li>3. Meningkatnya kemandirian sosial dan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga.</li> </ol>
		Dampak	Terwujudnya sistem layanan pemberdayaan perempuan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstandar di tingkat Kabupaten/Kota.

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Ibbu Araby, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda IV/ c  
NIP 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balai Kota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

■ **SKPD : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**TAHUN ANGGARAN : 2025**

<b>PROGRAM</b>	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
<b>KEGIATAN</b>	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>KODE Kegiatan</b>	2.08.02.2.03
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>Organisasi Perempuan : 57 Koordinator PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Anggota PEKKA Tahun 2024 : 108 Orang Jumlah Ormas Perempuan terstandardisasi : 0</p> <p>Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya sistem pembinaan dan pendampingan berkelanjutan terhadap organisasi perempuan dan LPLPP pasca sosialisasi dan bimtek.</li><li>2. Belum optimalnya sistem pembinaan dan pendampingan berkelanjutan terhadap organisasi perempuan dan LPLPP pasca sosialisasi dan bimtek.</li><li>3. Kapasitas kelembagaan dan SDM organisasi perempuan/LPLPP masih beragam, sehingga belum seluruhnya mampu menjalankan fungsi layanan pemberdayaan perempuan secara profesional dan berkelanjutan.</li><li>4. Rendahnya pemahaman sebagian organisasi perempuan dan masyarakat terhadap kebijakan kesetaraan gender dan implementasi PUG. Masih terbatasnya akses perempuan kepala keluarga (PEKKA) terhadap pelatihan, jejaring usaha, dan dukungan ekonomi berkelanjutan, meskipun jumlah peserta pelatihan meningkat.</li></ol>

	Belum terbentuknya ekosistem kemitraan lintas sektor (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas) yang mendukung penguatan dan standarisasi organisasi perempuan/LPLPP.	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan</b>	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan keberlanjutan kinerja lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota agar mampu menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan termasuk kelompok perempuan rentan melalui layanan yang responsif gender, terstandar, serta berorientasi pada pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan perempuan.
	<b>Aktivitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kebijakan Kesetaraan Gender kepada Organisasi Perempuan / LPLPP : 53 Organisasi</li> <li>2. Sosialisasi tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan kepada Organisasi Perempuan / LPLPP : 53 Organisasi</li> <li>3. Bimtek LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) : 53 Organisasi</li> <li>4. Pelatihan kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) : 139 Orang</li> </ol>
	<b>Sumber daya (Inputs)</b>	<p>Tenaga Ahli, Psikolog, Narasumber, Instruktur,</p> <p>Anggaran : PAD Kota Samarinda</p>

		Perangkat Keras : Laptop, Printer, LCD Proyektor, , Peralatan Pelatihan
	<i>output</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) yang memperoleh sosialisasi kebijakan kesetaraan gender dan PUG.</li> <li>2. Meningkatnya jumlah perempuan (termasuk PEKKA) yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan.</li> </ol>
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<i>Anggaran</i>	Rp. 223.382.000
	<i>SDM</i>	Tenaga Ahli, PSikolog, Narasumber, Instruktur,
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Perangkat Keras : Laptop, Printer, LCD Proyektor, , Peralatan Pelatihan
<b>Outcomes</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses, partisipasi, dan manfaat perempuan—termasuk kelompok perempuan rentan—terhadap layanan pemberdayaan perempuan.</li> <li>2. Meningkatnya peran dan kinerja kelembagaan LPLPP dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).</li> <li>3. Meningkatnya kemandirian sosial dan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga.</li> </ol>	
<b>Dampak</b>	Terwujudnya sistem layanan pemberdayaan perempuan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstandar di tingkat Kabupaten/Kota.	

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

**SAMARINDA 75112**

LEMBAR KERJA  
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
Tahun 2025

Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Perlindungan Perempuan
	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.</li><li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li></ul>
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li><li>- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</li><li>- Penguatan Jejaring antar Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li><li>- Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</li><li>- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan (UPTD PPA)</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (UPTD PPA)</li> </ul>
	Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Partisipasi Aktif Semua Pihak dalam Pencegahan Kekerasan</li> <li>- Memperkuat Jaringan Layanan dan Informasi tentang Kekerasan terhadap Perempuan</li> <li>- Mengurangi Angka Kekerasan terhadap Perempuan</li> </ul>
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)		<p>Jumlah data kekerasan terhadap perempuan yang terlayani komperhenisf tahun 2024 total 99 Kasus (UPTD PPA).</p> <p>Rincian Korban</p> <p>P : 103</p> <p>L : 0</p>
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan (452)	<p>Pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya masih terdapat keterbatasan koordinasi lintas sektor, rendahnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat, serta belum optimalnya kapasitas layanan dan perlindungan perempuan dan anak, khususnya di wilayah dan kelompok rentan, sehingga upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan maupun bencana belum berjalan optimal dan merata. Pelak</p>
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi lintas sektor belum berkelanjutan</li> <li>2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dan kader layanan PPA</li> </ol>
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko kekerasan dan perlindungan PPA</li> <li>2. Rendahnya keterlibatan laki-laki (suami) dalam kesiapsiagaan keluarga</li> <li>3. Belum meratanya implementasi Kabupaten/Kota Responsif Gender dan Anak (RBI)</li> <li>4. Kerentanan perempuan dalam situasi bencana</li> </ol>

		5. Terbatasnya akses kelompok rentan terhadap layanan perlindungan yang inklusif
Baris 4	Tujuan Responsif Gender	Memperkuat jaringan layanan perlindungan perempuan yang terintegrasi, inklusif, dan mudah diakses, melalui peningkatan kapasitas UPTD PPA dan mitra layanan, penyediaan informasi yang ramah perempuan dan kelompok rentan (termasuk penyandang disabilitas), serta penguatan mekanisme rujukan lintas sektor.
Baris 5	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Lintas Sektor</li> <li>2. Pencanaan RBI (2 Kecamatan ; Palaran, Sungai Kunjang)</li> <li>3. Sosialisasi 4 Titik Rentan (Kelurahan), SMK/SMA (6 Sekolah)</li> <li>4. Sosialisasi Suami Siaga di 5 KUA</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi 2 Kecamatan terpilih RBI</li> <li>6. Pelatihan Manajemen Kasus bagi kader FORUM PERKASA, Puspaga dan UPTD PPA</li> <li>7. Bimtek Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>8. Pemberian Bantuan Spesifik terhadap korban Bencana Khusus Perempuan</li> <li>9. Melaksanakan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)</li> <li>10. Launching SOPPA (Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Samarinda</li> </ol>
Baris 6	Data Dasar/Baseline	<p>Jumlah data kekerasan terhadap perempuan yang terlayani komperhenisf tahun 2024 total 99 Kasus (UPTD PPA).</p> <p>Rincian Korban</p> <p>P : 103</p> <p>L : 0</p>

Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	<p>Terlaksananya koordinasi lintas sektor, penganangan RBI di 2 kecamatan, serta sosialisasi pencegahan kekerasan di wilayah rentan, sekolah, dan KUA.</p> <p>Meningkatnya kapasitas petugas dan kader layanan PPA melalui pelatihan manajemen kasus dan bimtek bahasa isyarat.</p> <p>Tersalurkannya bantuan spesifik bagi perempuan korban bencana serta terselenggaranya 6 layanan UPTD PPA.</p>
		Outcome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya koordinasi, kapasitas, dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif gender dan inklusif.</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan keterlibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.</li> <li>3. Meningkatnya akses perempuan dan kelompok rentan terhadap layanan perlindungan dan penanganan kasus.</li> </ol>
		Dampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sistem perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dan berkeadilan gender.</li> <li>2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan anak</li> </ol>

Samarinda, 13 Januari 2026

Kepala Dinas


  
**Dr. Ibnu Araby, M.M.Pd**  
 Pembina Utama Muda IV/ c  
 NIP 196707131991031013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

**SAMARINDA 75112**

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**TAHUN ANGGARAN : 2025**

<b>PROGRAM</b>	Program Perlindungan Perempuan
<b>KEGIATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.</li><li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li></ul>
<b>KODE Kegiatan</b>	2.08.03.2.01 2.08.03.2.02 2.08.03.2.03
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>Jumlah data kekerasan terhadap perempuan yang terlayani komperhenisf tahun 2024 total 99 Kasus (UPTD PPA). Rincian Korban P : 103 L : 0</p> <p>Faktor Kesenjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi lintas sektor belum berkelanjutan</li><li>2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dan kader layanan PPA</li><li>3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko kekerasan dan perlindungan PPA</li><li>4. Rendahnya keterlibatan laki-laki (suami) dalam kesiapsiagaan keluarga</li><li>5. Belum meratanya implementasi Kabupaten/Kota Responsif Gender dan Anak (RBI)</li><li>6. Kerentanan perempuan dalam situasi bencana</li></ol>

	7. Terbatasnya akses kelompok rentan terhadap layanan perlindungan yang inklusif	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah kab/kota</li> <li>- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
	<b>Tujuan</b>	Memperkuat jaringan layanan perlindungan perempuan yang terintegrasi, inklusif, dan mudah diakses, melalui peningkatan kapasitas UPTD PPA dan mitra layanan, penyediaan informasi yang ramah perempuan dan kelompok rentan (termasuk penyandang disabilitas), serta penguatan mekanisme rujukan lintas sektor.
	<b>Aktivitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Lintas Sektor</li> <li>2. Pencanaan RBI (2 Kecamatan ; Palaran, SUNgai Kunjang)</li> <li>3. Sosialisasi 4 Titik Rentan (Kelurahan), SMK/SMA (6 Sekolah)</li> <li>4. Sosialisasi Suami Siaga di 5 KUA</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi 2 Kecamatan terpilih RBI</li> <li>6. Pelatihan Manajemen Kasus bagi kader FORUM PERKASA, Puspaga dan UPTD PPA</li> <li>7. Bimtek Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan</li> </ol>

			<p>Perlindungan Perempuan dan Anak</p> <p>8. Pemberian Bantuan Spesifik terhadap korban Bencana Khusus Perempuan</p> <p>9. Melaksanakan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)</p> <p>10. Launching SOPPA (Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Samarinda</p>
		<b>Sumber daya (Inputs)</b>	<p>SDM (Pegawai PD, Kader Forum Perkasa, TRC PPA, Satgas PPKS Kampus, PUSPAGA Cinta Syejati, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat)</p>
			<p>Anggaran :</p> <p>APBD Kota Samarinda</p> <p>DAK Non Fisik</p>
			<p>Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, Mobil Perlindungan).</p>
		<b>output</b>	<p>Terlaksananya koordinasi lintas sektor, pencaangan RBI di 2 kecamatan, serta sosialisasi pencegahan kekerasan di wilayah rentan, sekolah, dan KUA.</p>
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp. 987.137.000	
	<b>SDM</b>	SDM (Pegawai PD, Kader Forum Perkasa, TRC PPA, Satgas PPKS Kampus, PUSPAGA Cinta Syejati, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat)	

	<b>Peralatan dan Mesin</b>	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, Mobil Perlindungan).
<b>Outcomes</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya koordinasi, kapasitas, dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak yang responsif gender dan inklusif.</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan keterlibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.</li> <li>3. Meningkatnya akses perempuan dan kelompok rentan terhadap layanan perlindungan dan penanganan kasus</li> </ol>
<b>Dampak</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sistem perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dan berkeadilan gender.</li> <li>2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol>

Samarinda, 13 Januari 2026

Kepala Dinas



**Dr. Ibnu Araby, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 196707131991031013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dppakotasamarinda@yahoo.com)

**SAMARINDA 75112**

LEMBAR KERJA  
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
Tahun 2025

Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Kegiatan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.</li><li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota</li><li>- Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota</li></ul>
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memastikan strategi PUG terinternalisasi ke dalam sistem formal pemerintahan daerah, baik secara struktural, regulasi, maupun mekanisme kerja di seluruh perangkat daerah.</li></ul>
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	Jumlah PD dan Kecamatan yang menyelesaikan penyusunan GAP/GBS Tahun 2024 : Perangkat Daerah = 26 dari 30 (86,6%) Kecamatan = 9 dari 10 (90%)
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Resistensi atau hambatan pada sisa 4 PD dan 1 Kecamatan yang belum menyelesaikan GAP/GBS.
	Faktor kesenjangan/permasalahan (452)	

		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya jumlah fasilitator PUG dan Focal Point Terlatih PPRG yang mampu melakukan asistensi teknis mendalam.</li> <li>- Monitoring baru dilakukan di akhir tahun anggaran.</li> </ul>
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketiadaan data pembuka wawasan (data pilah) di tingkat sektor dan wilayah pada beberapa Perangkat Daerah</li> <li>- Belum ada instrumen yang mewajibkan GBS sebagai syarat mutlak pengesahan dokumen anggaran.</li> </ul>
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		Memastikan strategi PUG terinternalisasi ke dalam sistem pemerintahan daerah <b>guna menjamin kebijakan dan penganggaran yang adil bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan lainnya.</b>
Baris 5	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan Intensif (Klinik PPRG): Jemput bola dan pendampingan khusus bagi 4 PD dan 1 Kecamatan yang belum menyelesaikan dokumen untuk mengidentifikasi hambatan struktural mereka.</li> <li>2. Penguatan Basis Data: Membangun atau mengoptimalkan Sistem Informasi Data Terpilah yang dapat diakses oleh seluruh perencana di PD dan Kecamatan sebagai bahan baku utama analisis (Data Pembuka Wawasan).</li> </ol>
Baris 6	Data Dasar/Baseline		Jumlah PD dan Kecamatan yang menyelesaikan penyusunan GAP/GBS Tahun 2024 : Perangkat Daerah = 30 dari 30 (100 %) Kecamatan = 10 dari 10 (100%)
Baris 7	Pengukuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi teknis dan pendampingan penyusunan dokumen PPRG dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 100%</li> <li>- Jumlah Dokumen GAP/GBS yang telah divalidasi Pimpinan PD 100%</li> </ul>

		- Terbentuknya Sistem Data Gender yang disediakan untuk membantu PD & Kecamatan dalam menyusun Analisis gender.
	Outcome	- Meningkatnya persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD Kabupaten/Kota. - Terwujudnya pelembagaan PUG yang akuntabel pada seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan.
	Dampak	Kualitas hidup perempuan meningkat (IPG/IDG) & kesenjangan gender menurun (IKG).

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dppakotasamarinda@yahoo.com)

**SAMARINDA 75112**

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER ACTION BUDGET)**

**SKPD** : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**TAHUN ANGGARAN** : 2025

<b>PROGRAM</b>	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		
<b>KEGIATAN</b>	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
<b>KODE Kegiatan</b>	2.08.03.2.02		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>Jumlah PD dan Kecamatan yang menyelesaikan penyusunan GAP/GBS Tahun 2024 : Perangkat Daerah = 26 dari 30 (86,6%) Kecamatan = 9 dari 10 (90%)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Resistensi atau hambatan struktural pada sisa 4 PD dan 1 Kecamatan yang belum menyelesaikan GAP/GBS.</li><li>- Terbatasnya jumlah fasilitator PUG dan Focal Point Terlatih PPRG yang mampu melakukan asistensi teknis mendalam.</li><li>- Monitoring baru dilakukan di akhir tahun anggaran.</li><li>- Ketiadaan data pembuka wawasan (data pilah) di tingkat sektor dan wilayah pada beberapa Perangkat Daerah</li></ul>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan</b>	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
		<b>Tujuan</b>	Memastikan strategi PUG terinternalisasi ke dalam sistem pemerintahan daerah guna menjamin kebijakan dan penganggaran yang adil bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan lainnya.
		<b>Aktivitas</b>	1. Pendampingan Intensif (Klinik PPRG): Jemput bola dan pendampingan khusus bagi 4 PD dan 1 Kecamatan yang belum

		<p>menyelesaikan dokumen untuk mengidentifikasi hambatan struktural mereka.</p> <p>2. Penguatan Basis Data: Membangun atau mengoptimalkan Sistem Informasi Data Terpilah yang dapat diakses oleh seluruh perencana di PD dan Kecamatan sebagai bahan baku utama analisis (Data Pembuka Wawasan).</p>
	<b>Sumber daya (Inputs)</b>	<p>SDM Fasilitator, Focal Point Terlatih PPRG pada Perangkat Daerah, Staff Perencana/Program</p> <p>Anggaran : APBD Kota Samarinda</p> <p>Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, AI).</p>
	<b>output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi teknis dan pendampingan penyusunan dokumen PPRG dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 100%</li> <li>- Jumlah Dokumen GAP/GBS yang telah divalidasi Pimpinan PD 100%</li> <li>- Terbentuknya Sistem Data Gender yang disediakan</li> <li>- untuk membantu PD &amp; Kecamatan dalam menyusun Analisis gender.</li> </ul>
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp. 131.508.833
	<b>SDM</b>	SDM Fasilitator, Focal Point Terlatih PPRG pada Perangkat Daerah, Staff Perencana/Program, SDM pada Sekretariat POKJA PUG.

	<b>Peralatan dan Mesin</b>	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, AI).
<b>Outcomes</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD Kabupaten/Kota.</li> <li>- Terwujudnya pelembagaan PUG yang akuntabel pada seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan.</li> </ul>
<b>Dampak</b>		Kualitas hidup perempuan meningkat (IPG/IDG) & kesenjangan gender menurun (IKG).

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**(DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2025			
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</li><li>- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>	
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>	
	Tujuan	Memberdayakan keluarga agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal dalam membentuk individu yang berkualitas dan berdaya saing	
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	Data Putusan Dispensasi perkawinan usia anak tahun 2024 : <ul style="list-style-type: none"><li>- Catin usia anak laki-laki sebanyak 25 orang</li><li>- Catin usia anak perempuan sebanyak 77 orang</li></ul> Total : 102 Catin Usia Anak	
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sumber Daya Manusia yang Terbatas</li></ul>

		permasalahan (452)	- Stigma Sosial dan budaya membuat beberapa keluarga merasa malu untuk mengakses layanan peningkatan kualitas keluarga.
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	- SDM teknis profesional (Psikolog) - Belum tersedia Gedung dan Sarana Prasarana Puspaga - Belum memadainya anggaran untuk honorarium Psikolog Puspaga - Anggaran yang Tidak Memadai
		Sebab Kesenjangan Eksternal	- Kesenjangan dalam Penegakan Kebijakan dan Regulasi (Kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		menciptakan kondisi yang mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta menghapuskan ketidakadilan yang ada dalam struktur keluarga, yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
Baris 5	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan advokasi kebijakan dan sosialisasi Tentang UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak</li> <li>2. Melakukan MOU dengan Stakeholder dalam mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak</li> <li>3. Melakukan advokasi percepatan penurunan perkawinan usia anak berbasis komunitas</li> <li>4. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga</li> <li>5. Menginisiasi terbitnya Surat Edaran Walikota tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak di Kota Samarinda</li> <li>6. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga melalui PUSPAGA</li> <li>7. Membuat Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.</li> <li>8. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Radio (Heartline FM dan RRI Pro 1 FM)</li> </ol>

Baris 6	Data Dasar/Baseline	Data Putusan Dispensasi perkawinan usia anak tahun 2024 : - Catin usia anak laki-laki sebanyak 25 orang - Catin usia anak perempuan sebanyak 77 orang Total : 102 Catin Usia Anak	
Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan</li> <li>- Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>- Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak</li> </ul>
		Outcome	meningkatkan kesejahteraan keluarga secara holistik
		Dampak	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Kualitas Pengasuhan dan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas


  
**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**  
Kepala Dinas Utama Muda IV/ c  
NIP. 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**(DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**TAHUN ANGGARAN** : **2025**

<b>PROGRAM</b>	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
<b>KEGIATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</li><li>- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>	
<b>KODE Kegiatan</b>	2.08.04.2.02	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	Data Putusan Dispensasi perkawinan usia anak tahun 2024 : <ul style="list-style-type: none"><li>- Catin usia anak laki-laki sebanyak 25 orang</li><li>- Catin usia anak perempuan sebanyak 77 orang</li></ul> Total : 102 Catin Usia Anak	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/kota</li><li>- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>
	<b>Tujuan</b>	menciptakan kondisi yang mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta menghapuskan ketidakadilan yang ada dalam struktur keluarga, yang dapat menghambat kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

		<p><b>Aktivitas</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan advokasi kebijakan dan sosialisasi Tentang UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak.</li> <li>2. Melakukan MOU dengan Stakeholder dalam mencegah dan menurunkan angka perkawinan usia anak</li> <li>3. Melakukan advokasi percepatan penurunan perkawinan usia anak berbasis komunitas</li> <li>4. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga</li> <li>5. Menginisiasi terbitnya Surat Edaran Walikota tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak di Kota Samarinda</li> <li>6. Menyediakan Layanan Komprehensif bagi keluarga melalui PUSPAGA</li> <li>7. Membuat Video Iklan Layanan Masyarakat tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.</li> <li>8. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Radio (Heartline FM dan RRI Pro 1 FM)</li> </ol>
		<p><b>Sumber daya (Inputs)</b></p>	<p>SDM PD, Tenaga Profesional (Konselor dan Psikolog)</p> <hr/> <p>Anggaran : PAD</p> <hr/> <p>Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)</p>
		<p><b>output</b></p>	<p>- Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendaatkan Advokasi dan Pendampingan</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>- Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak</li> </ul>
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp. 572.427.000	
	<b>SDM</b>	Pegawai PD, Psikolog, Konselor dan Admin Puspaga	
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)	
<b>Outcomes</b>	meningkatkan kesejahteraan keluarga secara holistik		
<b>Dampak</b>	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Kualitas Pengasuhan dan Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender dalam Keluarga		

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**RR Tonu Araby, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
 Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

■

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2025			
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Program	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Kegiatan	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota</li> <li>● Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan PHA kewenangan kab/kota.</li> </ul>	
	Tujuan	Meningkatkan Kesadaran dan Edukasi kepada Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa melalui Pemantauan dan Evaluasi Implementasi PHA	
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sekolah Ramah Anak (SRA) Baru 1 Terstandarisasi (MTs Negeri) dari 174 Sekolah Ramah Anak sesuai SK Wali Kota</li> <li>● Puskesmas Ramah Anak (PRA) belum terstandarisasi dari 15 Puskesmas sesuai SK Wali Kota.</li> <li>● Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) : 1 terstandarisasi.</li> <li>● Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) baru 1 yang terstandarisasi (Taman Cerdas PKK)</li> <li>● Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) belum terstandarisasi dari 3 Rumah Ibadah sesuai SK Wali Kota.</li> <li>● SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) pada PD, LM, DU, dan Media Massa. Jumlah Peserta : 49 Orang L : 12 P : 37</li> </ul>	
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan (452)	Jumlah SDM terlatih KHA masih terbatas (49 orang) dan belum menjangkau seluruh perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara merata.
		Sebab Kesenjangan	

		Internal (di OPD)	Banyak unit layanan telah ditetapkan sebagai ramah anak melalui SK, namun belum memenuhi standar teknis (PRA, RIRA).
		Sebab Kesenjangan Eksternal	Ruang bermain, rumah ibadah, dan fasilitas publik masih sangat terbatas yang memenuhi standar ramah anak.
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara setara dan inklusif bagi perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak anak, melalui pemantauan dan evaluasi implementasi PHA yang berperspektif gender dan kepentingan terbaik bagi anak.
Baris 5	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pra Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak pada sarana prasarana pendukung.</li> <li>2. Rakor Gugus Tugas KLA</li> <li>3. Proses Evaluasi Mandiri KLA</li> <li>4. Bimtek Konvensi Hak Anak (KHA)</li> <li>5. Advokasi KLA</li> <li>6. Bimtek SRA (Sekolah Ramah Anak)</li> <li>7. Sosialisasi RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak)</li> <li>8. Sosialisasi PRA (Puskemas Ramah Anak)</li> <li>9. Penguatan FA (Forum Anak) Kota, Kecamatan, Kelurahan.</li> <li>10. Peringatan HAN (Hari Anak Nasional)</li> <li>11. Penetapan RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak), PRA (Puskesmas Ramah Anak)</li> </ol>
Baris 6	Data Dasar/Baseline (Copy Data Pembuka Wawasan)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sekolah Ramah Anak (SRA) Baru 1 Terstandarisasi (MTs Negeri) dari 174 Sekolah Ramah Anak sesuai SK Wali Kota</li> <li>● Puskesmas Ramah Anak (PRA) belum terstandarisasi dari 15 Puskesmas sesuai SK Wali Kota.</li> <li>● Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) : 1 terstandarisasi.</li> <li>● Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) baru 1 yang terstandarisasi (Taman Cerdas PKK)</li> <li>● Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) belum terstandarisasi dari 3 Rumah Ibadah sesuai SK Wali Kota.</li> <li>● SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) pada PD, LM, DU, dan Media Massa. Jumlah Peserta : 49 Orang L : 12 P : 37</li> </ul>

Baris 7	Pengu kuran Hasil	Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah SDM teredukasi dan terlatih PHA berperspektif gender pada PD, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa, dengan data terpilah jenis kelamin.</li> <li>2. Tersusunnya SK Walikota Penetapan RIRA dan PRA</li> </ol>
		Outcome	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan (perempuan dan laki-laki) mengenai prinsip pemenuhan hak anak dan PHA.
		Dampak	Menurunnya kesenjangan akses dan kualitas layanan publik ramah anak akibat penguatan kebijakan dan praktik PHA yang terlembaga.

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**

Rembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD** : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**TAHUN ANGGARAN** : 2025

<b>PROGRAM</b>	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
<b>KEGIATAN</b>	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	
<b>KODE Kegiatan</b>	2.08.06.2.01	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sekolah Ramah Anak (SRA) Baru 1 Terstandardisasi (MTs Negeri) dari 174 Sekolah Ramah Anak sesuai SK Wali Kota</li><li>● Puskesmas Ramah Anak (PRA) belum terstandardisasi dari 15 Puskesmas sesuai SK Wali Kota.</li><li>● Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) : 1 terstandardisasi.</li><li>● Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) baru 1 yang terstandardisasi (Taman Cerdas PKK)</li><li>● Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) belum terstandardisasi dari 3 Rumah Ibadah sesuai SK Wali Kota.</li><li>● SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) pada PD, LM, DU, dan Media Massa. Jumlah Peserta : 49 Orang L : 12 P : 37</li></ul> <p>Faktor Kesenjangan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Banyak unit layanan telah ditetapkan sebagai ramah anak melalui SK, namun belum memenuhi standar teknis (PRA, RIRA).</li><li>● Ruang bermain, rumah ibadah, dan fasilitas publik masih sangat terbatas yang memenuhi standar ramah anak.</li></ul>	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan</b>	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
	<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas

			Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara setara dan inklusif bagi perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak anak, melalui pemantauan dan evaluasi implementasi PHA yang berperspektif gender dan kepentingan terbaik bagi anak.
		<b>Aktivitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pra Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak pada sarana prasarana pendukung.</li> <li>2. Rakor Gugus Tugas KLA</li> <li>3. Proses Evaluasi Mandiri KLA</li> <li>4. Bimtek Konvensi Hak Anak (KHA)</li> <li>5. Advokasi KLA</li> <li>6. Bimtek SRA (Sekolah Ramah Anak)</li> <li>7. Sosialisasi RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak)</li> <li>8. Sosialisasi PRA (Puskesmas Ramah Anak)</li> <li>9. Penguatan FA (Forum Anak) Kota, Kecamatan, Kelurahan.</li> <li>10. Peringatan HAN (Hari Anak Nasional)</li> <li>11. Penetapan RIRA (Rumah Ibadah Ramah Anak), PRA (Puskesmas Ramah Anak)</li> </ol>
		<b>Sumber daya (Inputs)</b>	SDM
	Anggaran		
	Perangkat Keras (Komputer)		
		<b>output</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah SDM tereduksi dan terlatih PHA berperspektif gender pada PD, lembaga masyarakat,</li> </ol>

			dunia usaha, dan media massa, dengan data terpilah jenis kelamin
			2. Tersusunnya SK Walikota Penetapan RBRA dan PRA
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<i>Anggaran</i>	Rp. 620.000.000	
	<i>SDM</i>	Pegawai PD, APSAI,	
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Komputer, Scanner, Printer	
<b>Outcomes</b>	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan (perempuan dan laki-laki) mengenai prinsip pemenuhan hak anak dan PHA.		
<b>Dampak</b>	Menurunnya kesenjangan akses dan kualitas layanan publik ramah anak akibat penguatan kebijakan dan praktik PHA yang terlembaga.		

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas


  
**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**  
 Pembina Utama Muda IV/ c  
 NIP. 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

■

LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Tahun 2025		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program	Program Perlindungan Khusus Anak
	Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Penyediaan Layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota</li></ul>
	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA</li><li>- Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota</li><li>- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi AMPK tingkat Daerah kab/kota</li><li>- Koordinasi layanan pelaksanaan layanan AMPK</li></ul>
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak-hak anak.</li><li>- Tersedianya 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)</li></ul>

Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komprehensif tahun 2024 : 146 Korban (UPTD PPA) L : 51 P : 95</li> <li>- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA</li> </ul>
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Faktor kesenjangan/ permasalahan (452)	Masih rendahnya kesadaran dan kapasitas lembaga, petugas layanan, dan masyarakat dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, serta menangani kekerasan dan paparan pornografi terhadap anak secara terpadu, responsif gender, dan ramah anak.
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya kapasitas petugas layanan (UPTD PPA, RS, TRC PPA, PATBM)</li> <li>2. Koordinasi lintas sektor belum optimal, khususnya antara lembaga pendidikan, layanan kesehatan, penegak hukum, dan UPTD PPA</li> <li>3. Keterbatasan jumlah dan kesiapan PATBM aktif, baik dari sisi struktur organisasi, pemahaman peran, maupun keterampilan penanganan kasus awal.</li> </ol>
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kuatnya budaya diam dan normalisasi kekerasan terhadap anak, termasuk anggapan bahwa kekerasan adalah urusan domestik.</li> <li>2. Tingginya paparan pornografi terhadap anak, seiring penggunaan teknologi digital tanpa pengawasan memadai.</li> <li>3. Ketakutan korban dan keluarga untuk melapor, karena stigma sosial, relasi kuasa, dan kurangnya kepercayaan pada sistem layanan.</li> </ol>
Baris 4	Tujuan Responsif Gender		Mewujudkan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pelayanan yang komprehensif, berkelanjutan, serta responsif gender melalui penyediaan 6 layanan UPTD PPA yang mudah diakses, aman, dan ramah anak bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak,

			dengan memperhatikan kebutuhan spesifik berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kerentanan.
Baris 5	Rencana Aksi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di Lembaga Pendidikan</li> <li>2. Sosialisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM Petugas Penyedia Layanan (Diknas, UPTD PPA, Rumah Sakit, TRC PPA, PATBM)</li> <li>4. Pembentukan dan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus bagi PATBM</li> <li>5. Pelaksanaan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)</li> <li>6. Inisiasi Aplikasi SOPPA (Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Samarinda</li> </ol>
Baris 6	Data Dasar/Baseline		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komprehensif tahun 2024 : 146 Korban (UPTD PPA) L : 51 P : 95</li> <li>- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA</li> </ul>
Baris 7	Pengukuran Hasil	Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya 6 layanan UPTD PPA yang operasional dan responsif gender (pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan).</li> <li>2. Tersedianya data dan dokumentasi layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan jenis kekerasan.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya jumlah anak korban (perempuan dan laki-laki) yang memperoleh layanan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan spesifiknya.</li> </ol>
		Outcome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak yang aman, ramah anak, dan responsif gender bagi anak perempuan dan anak laki-laki korban kekerasan.</li> <li>2. Meningkatnya pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak korban kekerasan melalui penanganan kasus yang terpadu dan berkelanjutan.</li> <li>3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan UPTD PPA sebagai mekanisme perlindungan anak.</li> </ol>
		Dampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sistem perlindungan anak yang inklusif, adil gender, dan berkelanjutan di tingkat daerah.</li> <li>2. Meningkatnya pemenuhan hak anak atas rasa aman, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal tanpa diskriminasi gender.</li> </ol>

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Hani Araby, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK (DP2PA)**

Jln. Dahlia No. 01. Komplek Balaikota. Kelurahan Bugis. Kota Samarinda Tel/Fax (0541) 743307,  
Telpon Pengaduan +62 833-2442-1313 Kode Pos : 75121 Email : [dpppakotasamarinda@yahoo.com](mailto:dpppakotasamarinda@yahoo.com)

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**TAHUN ANGGARAN : 2025**

<b>PROGRAM</b>	Program Perlindungan Khusus Anak
<b>KEGIATAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li><li>- Penyediaan Layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota</li></ul>
<b>KODE Kegiatan</b>	2.08.05.2.01
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah data kekerasan terhadap Anak yang terlayani komprehensif tahun 2024 : 146 Korban (UPTD PPA) L : 51 P : 95</li><li>- Jumlah data pilah gender dan anak pada OPD dan Lembaga Terkait Data SIGA</li></ul> <p>Faktor Kesenjangan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum meratanya kapasitas petugas layanan (UPTD PPA, RS, TRC PPA, PATBM)</li><li>- Koordinasi lintas sektor belum optimal, khususnya antara lembaga pendidikan, layanan kesehatan, penegak hukum, dan UPTD PPA</li><li>- Keterbatasan jumlah dan kesiapan PATBM aktif, baik dari sisi struktur organisasi, pemahaman peran, maupun keterampilan penanganan kasus awal.</li><li>- Masih kuatnya budaya diam dan normalisasi kekerasan terhadap anak, termasuk anggapan bahwa kekerasan adalah urusan domestik.</li><li>- Tingginya paparan pornografi terhadap anak, seiring penggunaan teknologi digital tanpa pengawasan memadai.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketakutan korban dan keluarga untuk melapor, karena stigma sosial, relasi kuasa, dan kurangnya kepercayaan pada sistem layanan.</li> </ul>	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyediaan Layanan bagi AMPK yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota</li> </ul>
	<b>Tujuan</b>	Mewujudkan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pelayanan yang komprehensif, berkelanjutan, serta responsif gender melalui penyediaan 6 layanan UPTD PPA yang mudah diakses, aman, dan ramah anak bagi anak perempuan dan anak laki-laki yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak anak, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kerentanan.
	<b>Aktivitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di Lembaga Pendidikan</li> <li>2. Sosialisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM Petugas Penyedia Layanan (Diknas, UPTD PPA, Rumah Sakit, TRC PPA, PATBM)</li> <li>4. Pembentukan dan Pelatihan Manajemen dan</li> </ol>

			<p>Penanganan Kasus bagi PATBM</p> <p>5. Pelaksanaan 6 Layanan UPTD PPA (Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan terhadap Klien yang mengalami kekerasan)</p> <p>6. Inisiasi Aplikasi SOPPA (Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Samarinda</p>
		<b>Sumber daya (Inputs)</b>	<p>SDM yang bersertifikasi (Mediator, Fasilitator, Psikolog, Banhum)</p> <p>Anggaran : PAD</p> <p>Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)</p>
		<b>output</b>	<p>1. Terselenggaranya 6 layanan UPTD PPA yang operasional dan responsif gender (pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan).</p> <p>2. Tersedianya data dan dokumentasi layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan jenis kekerasan.</p> <p>3. Meningkatnya jumlah anak korban (perempuan dan laki-laki) yang memperoleh</p>

			layanan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan spesifiknya.
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp. 594.177.000 (APBD) Rp. 375.690.000 (DAK Non Fisik)	
	<b>SDM</b>	Pegawai PD, UPTD PPA, Aktivistis, Satgas TPKS, Forum Anak, TRC PPA	
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Hard Disk Eksternal, Flash Disk)	
<b>Outcomes</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak yang aman, ramah anak, dan responsif gender bagi anak perempuan dan anak laki-laki korban kekerasan.</li> <li>2. Meningkatnya pemulihan fisik, psikologis, dan sosial anak korban kekerasan melalui penanganan kasus yang terpadu dan berkelanjutan.</li> <li>3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan UPTD PPA sebagai mekanisme perlindungan anak.</li> </ol>		
<b>Dampak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sistem perlindungan anak yang inklusif, adil gender, dan berkelanjutan di tingkat daerah.</li> <li>2. Meningkatnya pemenuhan hak anak atas rasa aman, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal tanpa diskriminasi gender.</li> </ol>		

Samarinda, 12 Januari 2026

Kepala Dinas



**DR. Ibnu Araby, M.M.Pd**

Pembina Utama Muda IV/ c

NIP 19670713 199103 1 013